BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Saat ini Yunani sedang mengalami Krisis Ekonomi akibat akumulasi hutang yang membengkak. Secara ekonomi, sebelum bergabung dengan *Eurozone* pemerintah Yunani sudah boros dalam hal anggaran. Setelah mengadopsi *Euro* sebagai mata uang, pengeluaran publik justru semakin meningkat. Selain itu, Yunani lebih banyak melakukan impor daripada melakukan ekspor. Pengeluaran pemerintah Yunani merupakan salah satu pengeluaran terbesar jika dibandingkan dengan negara anggota *Eurozone* yang lain. Akan tetapi, pengeluaran dalam jumlah yang besar tidak diiringi dengan pemasukan yang besar. Akibatnya, neraca anggaran Yunani selalu mengalami ketidakseimbangan. Namun dalam hal ini Uni Eropa sebagai organisasi internasional memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani, di dalam hal ini Uni Eropa memiliki peranan untuk mengeluarkan Yunani dalam zona krisis, di sini dalam Bab terakhir ini peneliti menyimpulkan peranan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani, diawali dengan langkah-langkah yang diterapkan oleh Uni Eropa, hambatan-hambatan serta perkembangan perekonomian yunani setelah mendapatkan bantuan dari Uni Eropa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uni Eropa memiliki berbagai macam program dalam mengatasi krisis ekonomi untuk Negara-negara anggotanya. Dalam hal ini Uni Eropa

menerapkan beberapa langkah dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani seperti:

a. *Economic Adjustment Programme*

   Sebuah program yang dirancang oleh Pemerintah Yunani, *European Commission,* ECB dan IMF sebagai bentuk kesepakatan dari timbak balik bantuan yang diberikan untuk Pemerintah Yunani dalam mengatasi krisis ekonomi.

b. *The European Financial Stability Facility*

   Merupakan sebuah program bantuan keuangan untuk Yunani yang di buat oleh pemerintah Yunani dan *Eurogroup* dalam hal pengaturan kebijakan moneter.

c. *The Stability and Grow Pact*

   Program yang di buat oleh Bank Sentral Eropa melalui kesepakan bersama Negara-negara anggota Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal bagi Negara-negara yang menggunakan mata uang tunggal *euro*.

2. Penerapan Program-program yang dibuat oleh Uni Eropa sebagai berikut *First Economic Adjustment Programme* dan dilanjutkan kembali pada tahapan berikutnya melalui *Second Economic Adjustment Programme* serta *The Stability and Growth Pact* yang dibawah kebijakan moneter dan fiskal *European Central Bank* (ECB) Untuk Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani, yang di mana Pemerintah Yunani harus menerapkan kebijakan-kebijakan

yang dikeluarkan oleh Komisis Eropa, ECB dan IMF berupa kebijakan reformasi fiskal, sektor finansial, dan sektor struktural.

3. Di dalam hambatannya dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani, Uni Eropa harus dapat meninjau kembali mengenai bantuan pinjaman yang harus mereka lakukan, dikarenakan Negara-negara denga perekonomian besar seperti Jerman dan Perancis menolak untuk memberikan tahapan kedua untuk Yunani, serta adanya demonstrasi dari warga negara kedua Negara tersebut. Serta dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh ECB terhadap Yunani, yang sangat merugikan warga Negara Yunani.
4. Perkembangan perekonomian Yunani setelah mendapatkan bantuan pinjaman dari Uni Eropa memiliki perubahan yang cukup baik. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan iklim ekonomi Yunani, berkurangnya imigran serta perubahan dalam sektor pajak, yang memberikan dampak yang sangat baik untuk rakyat Yunani.
5. Dalam analisis teori Peranan Uni Eropa sebagai arena melakukan kesepakatan antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa dalam rangka pengetatan anggaran. Melalui *First Economic Adjustment Programme* dan dilanjutkan kembali pada tahapan berikutnya melalui *Second Economic Adjustment Programme* serta *The Stability and Growth Pact* yang dibawah kebijakan moneter dan fiskal *European Central Bank* (ECB). Hal ini memiliki visi untuk mengurangi secara signifikan defisit anggaran Yunani menjadi di bawah 3% dari jumlah PDB pada tahun 2014. EAP sebagai implementasi nyata interaksi antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa dimotori oleh kepentingan Uni Eropa

untuk mencegah efek *contagion* (domino) dari krisis yang terjadi di Yunani sekaligus untuk melindungi perekonomian negara anggota Uni Eropa yang lain, khususnya negara periferi yang memiliki sistem perekonomian lemah dan tingkat hutang yang tinggi, seperti Portugal, Irlandia, Spanyol, dan Italia. Selain itu, bantuan Uni Eropa juga sebenarnya dirancang untuk menyelamatkan institusi-institusi perbankan dari negara-negara kreditur, seperti Jerman dan Perancis, yang *notabene* kedua negara ini adalah negara penting yang mendominasi politik dan ekonomi Uni Eropa.

Dengan adanya EAP, sebagai kebijakan yang kuat dan berkelanjutan ini, diharapkan perekonomian Yunani akan lebih baik dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan program ini dan mencapai tujuan, segala elemen kebijakan fiskal, finansial, dan struktural akan digunakan. Dalam hal reformasi kebijakan fiskal, pengaturan pemasukan dan pengeluaran menjadi penopang dari langkah untuk memperbaiki fiskal dan merestorasi daya saing, termasuk di dalamnya adalah menaikkan berbagai pajak dan mengurangi dana jaminan sosial. Dalam reformasi kebijakan finansial, pemerintah Yunani mendirikan badan independen *Financial Stability Fund* (Dana Stabilitas Keuangan) di bawah koordinasi langsung dengan Troika (UE, ECB dan IMF). Dalam hal kebijakan struktural, pemerintah Yunani berusaha untuk memodernisasi administrasi publik, memperkuat pasar tenaga kerja dan kebijakan pendapatan, memperbaiki lingkungan bisnis dan mendorong pasar yang kompetitif, serta memanajemen ulang badan usaha milik negara.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti. Dalam mengatasi krisis sebagai berikut:

1. Sebaiknya negara-negara besar anggota Uni Eropa, mengesampingkan kepentingannya terlebih dahulu dan berfokus pada pengambilan kebijakan dan tindakan yang efektif dan efisien dalam mengatasi krisis yang sudah terjadi dan meminimalisasi dampak negatif yang diesebabkan oleh krisis.
2. Dampak Kebijakan Moneter ECB sebagai ujung tombak perekonomian *Eurozone* sebaiknya dibebaskan dari kepentingan politik dan ekonomi segelintir negara anggota. Uni Eropa perlu menciptakan sinkronisasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk menciptakan integrasi ekonomi dan moneter yang sehat. Kebijakan moneter tunggal jangan hanya disesuaikan untuk kondisi perekonomian negara besar dengan kebijakan fiskal yang kuat, melainkan juga perlu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian negara dengan kebijakan fiskal lemah seperti Yunani.
3. Uni Eropa perlu segera memperbaiki sistem ekonominya, termasuk memberi solusi bagi negara anggota ketika menghadapi kemerosotan ekonomi dan tekanan akibat resesi. Uni Eropa juga perlu memaksimalisasi fungsi sistem dan mekanisme yang sudah ada, seperti *Stability and Growth Pact* (SGP), *European Financial Stability Facility* (EFSF) dan *Economic Adjustment Programme* (EAP). Uni Eropa juga harus lebih tegas dalam menindak negara-negara anggotanya yang melanggar batas stabilitas dan

jangan pilih kasih. Negara pertama yang melanggar SGP sebenarnya adalah Jerman, lalu disusul Perancis, dan akhirnya tindakan kedua negara tersebt ditiru oleh negaranegara periferi anggota *Eurozone* karena negara-negara periferi melihat bahwa tidak ada sanksi tegas ketika melanggar SGP, akibatnya muncul lah krisis berkepanjangan seperti saat ini. Uni Eropa juga sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan terkait penanganan krisis saat ini. Dalam kondisi saat ini, krisis yang terjadi tidak hanya satu di Yunani, melainkan lebih dari satu, yaitu krisis yang terjadi di Irlandia, Portugal, Italia, dan Spanyol. Kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam menangani krisis Yunani akan berpengaruh terhadap krisis yang terjadi di Irlandia, Portugal, Italia, dan Spanyol. Uni Eropa harus berhati-hati dan cermat dalam mengambil kebijakan karena kebijakan yang diambil akan memengaruhi masa depan Uni Eropa sendiri.

4. Bagi pemerintah Yunani, pemerintah Yunani juga sebaiknya memerhatikan kesejahteraan masyarakat dalam mengimplementasi EAP karena yang paling merasakan implikasi negatif dari *austerity measures* yang diambil oleh pemerintah adalah masyarakat Yunani. Padahal yang menyebabkan krisis sebenarnya adalah kegagalan pemerintah dalam memanajemen anggaran dan ketidaktransparanan. Hal yang pertama kali perlu dilakukan adalah memperbaiki produktivitas dan kompetivitas produk, baik itu barang dan jasa Yunani di pasar komoditas internasional untuk mendorong meningkatnya pendapatan tanpa perlu mengorbankan kondisi perekonomian dan kesejahteraan domestik. Letak geografis

Yunani yang berada di dataran selatan Eropa dan dekat dengan Mediterania membuat Yunani dianugerahi kekayaan dan tingkat kesuburan tanah yang membuat produk agrikultur Yunani unggul. Selain itu, pariwisata Yunani juga dapat ditingkatkan untuk mendorong pendapatan tanpa harus bergantung pada *Economic Adjustment Programme*.

5. Di samping mencari solusi untuk mengatasi krisis, sebaiknya pemerintah Yunani juga mencari solusi untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar dan membudaya di Yunani, karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab krisis yang terjadi adalah tingginya tingkat korupsi. Pemerintah yang memimpin saat ini juga diharapkan jangan hanya menyalahkan pemerintah yang berkuasa sebelumnya yang menyebabkan hutang membengkak, melainkan berusaha membuka lembaran baru untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Koalisi partai politik yang ada dalam pemerintahan yang saat ini berkuasa juga diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan mengesampingkan kepentingan partainya dahulu demi memfokuskan diri pada kolaborasi untuk mengatasi krisis.
6. Masyarakat Yunani juga jangan hanya menyalahkan pemerintah, namun juga harus berbenah diri dan mendukung dan mengontrol usaha yang diambil pemerintah. Masyarakat Yunani diharapkan semakin sadar untuk membayar pajak dan menghentikan budaya menghindari pembayaran pajak. Reformasi mikroekonomi melalui masyarakat merupakan salah satu

cara untuk mengatasi implikasi negatif baik dari krisis maupun implementasi EAP. Apabila sebelumnya, masyarakat Yunani mayoritas bekerja sektor publik, alangkah baiknya jika kegiatan wirausaha ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

7. Krisis yang terjadi di Yunani juga diharapkan memberikan pelajaran positif bagi pemerintah dan masyarakat negara lain, termasuk Indonesia.

Mengingat adanya kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada akademisi atau peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian pada topik ini agar dapat melakukan pengembangan penelitian yang lebih komprehensif. Krisis Ekonomi Yunani ini sangat lah kompleks dan sampai saat ini masih berlangsung, oleh karena itu dengan adanya penelitian baru yang jauh lebih mendalam diharapkan dapat membantu pemahaman masyarakat terkait topik Krisis Ekonomi Yunani ini, khususnya bagaimana interaksi antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa.